

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV, maka pada bab V ini penulis akan merumuskan kesimpulan sebagai inti dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, peneliti menyarankan implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait penelitian dengan judul implementasi kebijakan program Indonesia pintar Dalam upaya pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Simpulan akan dijelaskan menjadi dua yaitu simpulan umum dan simpulan khusus untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Sedangkan implikasi merupakan penjelasan penulis terkait dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut, dan rekomendasi ditampilkan penulis untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar secara nasional mempunyai angka target yang sangat banyak dan anggaran yang besar. Hal ini sangat menarik perhatian dari instansi-instansi dan khalayak umum dari berbagai kalangan. Adanya pelaksanaan Program Indonesia Pintar diharapkan dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Terealisasinya pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang transparan dan akuntabel ditandai dengan adanya penggunaan dana Program Indonesia Pintar oleh siswa penerima berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung khususnya di SMAN 4 Bandung mampu menjalankan program ini dengan baik. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan suatu program dari pemerintah yang memberikan bantuan berupa dana pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21

Diah Istikomah, 2021

IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahun) atau yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/ KKS) atau anak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program Indonesia Pintar ini menunjukkan bahwa peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya. Dalam memenuhi biaya pendidikan yang masih kurang. Pemanfaatan dari dana program ini diberikan untuk keperluan perlengkapan sekolah seperti pembelian buku, alat-alat tulis, seragam, transportasi siswa ke sekolah, uang saku, serta biaya les tambahan siswa. Di SMAN 4 Bandung memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang memenuhi kriteria tersebut. Dinas pendidikan Jabar membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk memperoleh pendidikan yang layak.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah strategi pemerintah dalam menanggulangi angka putus sekolah di Indonesia untuk warga miskin. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan sekolah yang sebelumnya tidak dapat terpenuhi. Program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yang dalam upaya menanggulangi angka putus sekolah di Indonesia. ES selaku staf kepengawasan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengatakan bahwa program Indonesia pendidikan sudah dilaksanakan kepengawasan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengatakan, pelaksanaan program ini sudah diterapkan berbagai jenjang, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung. Program ini sudah membantu peserta didik untuk meringankan biaya pendidikan maupun biaya perlengkapan pendidikan. ZH, dan SR selaku penerima Penerima Program Indonesia Pintar SMA Negeri 4 Bandung sudah memenuhi tahap penyeleksi kriteria tersebut dengan baik dikarenakan mereka adalah keluarga yang

mengalami musibah dalam pekerjaan orang tua mereka. NS mengatakan bahwa sekolah sangat membina siswa yang dikatakan kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan. Pemberian bantuan melalui program Indonesia pintar merupakan suatu bentuk mewajibkan pendidikan untuk semua kalangan. menurut RP Sangat disayangkan jika program ini tidak dilaksanakan dikarenakan program ini adalah program pemerintah untuk membantu siswa yang tidak mampu, bantuan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran bagi mereka khususnya untuk membeli keperluan sekolah. Program Indonesia Pintar di sekolah menjadikan siswa yang belum dapat memperoleh pendidikan yang layak dan juga memiliki hak yang sama dengan peserta didik lain. Strategi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Jawa barat menurut ES Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi keningkat satuan pendidikan sekolah ataupun Kepala sekolah agar memberikan informasi pencairan dana kepada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa Dinas ataupun sekolah memang wajib memberikan arahan arahan yang tepat untuk orang tua peserta didik dalam mensosialisasikan program ini.

2. Implementasi Kebijakan program Indonesia dalam upaya pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas tentu masih memiliki berbagai kendala yang berbeda beda diberbagai pihak. Diantaranya yaitu peserta didik sangat lama untuk mengumpulkan persyaratan pengajuan program ini, ada pula peserta didik yang sudah lulus masih terdaftar sebagai penerima program ini, dan masih banyak yang kurang mengerti kegunaan dana yang diberikan, banyak dari peserta didik yang tidak ingat bahwa bantuan tersebut digunakan untuk membiaya pendidikannya bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak memiliki kepentingan dengan sekolah. Selain itu juga pencairan dana dari program ini yang sangat tidak diketahui pasti mengakibatkan orang tua peserta didik kebingungan, pada akhirnya orang tua peserta didik harus mencari informasi secara mandiri kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada kebijakan Program Indonesia Pintar yaitu dengan mengadakan pelaksanaan evaluasi dalam menghadapi kendala pada Implementasi Kebijakan program Indonesia dalam upaya pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dengan cara memberikan pendidikan yang layak untuk peserta didik yang kurang mampu, serta mengurangi angka putus sekolah agar peserta didik bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Dinas pendidikan berupaya memberikan informasi secara rutin ke pihak sekolah dan secara online membuka informasi 24 jam. Informasi tersebut mengenai buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara lisan.

5.2 Implikasi

1. Bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat

Implikasi dari penelitian ini, pengalaman membuktikan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan inovasi kebijakan pemerintah bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk mewujudkan tidak adanya lagi peserta didik yang putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya.

2. Bagi Sekolah

Implikasi dari Karya ilmiah ini membuktikan bahwa pentingnya sekolah dalam pendidikan formal bagi masyarakat. Sekolah berperan penting dalam terwujudnya Program Indonesia Pintar, karena sekolah merupakan landasan bagi peserta didik untuk mewujudkan keinginan peserta didik di masa depan.

3. Bagi Peserta didik

Implikasi dari karya ilmiah ini ialah memfasilitasi siswa yang berasal dari keluarga kurang untuk memperoleh hak yang sama dengan wajib belajar 12 tahun tanpa takut kendala biaya. Peserta didik pun harus mengetahui bahwa pemerintah mengadakan Program Indonesia Pintar untuk mengurangi angka putus sekolah karena tidak memiliki dana untuk pendidikan.

Diah Istikomah, 2021

IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat

Bagi Dinas Pendidikan, perlunya informasi pasti terkait pencairan dana pendidikan agar orangtua peserta didik dapat mengetahui kapan dana akan disalurkan di setiap semester. Hal ini dikatakan penting karena tidak ada tanggal pasti kapan dana pendidikan akan disalurkan, sedangkan banyak keperluan dalam bidang pendidikan yang harus dibiayai.

5.3.2 Bagi Sekolah

Bagi Sekolah perlunya sosialisasi secara berkala agar terciptanya pemahaman di kalangan peserta didik maupun orangtua. Selain itu, dilakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap pemanfaatan dana oleh peserta didik agar terhindar dari penyalahgunaan dana bantuan.

5.3.3 Bagi Peserta Didik

Peserta didik yang menerima bantuan Indonesia Pintar ini diharapkan menggunakan dana tersebut benar benar untuk keperluan pendidikan tidak digunakan untuk keperluan lain diluar keperluan pendidikan. Bagi keluarga yang dianggap mampu diharapkan memiliki kesadaran diri supaya tidak menerima dana bantuan dan menyerahkan kepada yang lebih membutuhkan.

5.3.4 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai program pemerintah di bidang pendidikan serta mengkaji lebih dalam permasalahan tentang program pemerintah serta memahami proses dalam kebijakan program tersebut.

5.3.5 Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn FPIPS UPI) yang tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan program pemerintah di bidang pendidikan. Kemudian diharapkan akan lebih banyak melaksanakan berbagai kajian serta pemahaman yang luas terhadap mahasiswa bukan hanya tentang pembelajaran, melainkan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam kebijakan.

Diah Istikomah, 2021

IMPLEMENTASI CIVIC VIRTUE MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu